

# **KLIPPING BERITA MEDIA MASSA**



**Sabtu-Senin, 23-25 Maret 2019**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (halaman 8)	Minggu, 24 Maret 2019	Banjaratma Jadi Etalase Produk Lokal	Tempat istirahat dan pelayanan atau TIP 260OB (rest area) Banjaratma pada ruas Tol Pajagan-Pemalang Kilometer 260 di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi percontohan dalam menjajakan produk local usaha mikro, kecil, dan menengah. Diuji coba sejak pekan lalu, rest area itu ditargetkan beroperasi penuh pada masa mudik Lebaran 2019. Dari pantauan, Sabtu (23/3/2019), sejumlah pelaku UMKM telah menjual produk khas Brebes dan sekitarnya di gerai yang tersedia di TIP 260B, seperti telur asin, bawang goreng, poci, dan pakaian. Namun, beberpa bagian belum di manfaatkan karena dalam proses renovasi.
2	Koran Tempo (halaman 6)	Sabtu- Minggu,23-24 Maret 2019	Normalisasi Ciliwung Mandek Dua Tahun	Proyek atau perbaikan normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta mandek sejak 2017. Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bambang Hidayah, hal itu terjadi karena pemerintah DKI tak kunjung menyelesaikan pembebasan lahan di bantaran kali tersebut.
3	Kompas (halaman 10)	Sabtu, 23 Maret 2019	Masih Ada Yang Tertinggal	Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menekankan keadilan, kesetaraan, dan memiliki moto mo one left behind. Semua harus menikmati semua. Maka, Hari Air Sedunia tahun 2019 diperingati tiap tanggal 22 Maret mengusung tema “Tak Meninggalkan Siapa Pun”. Sasaran ke-6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni memastikan tercapainya ketersediaan dan pengelolaan air berkelanjutan bagi semua orang pada 2030. Target itu bermakna: tak seorang pun boleh tertinggal, semua mendapatkan.
4	Kompas (halaman 11)	Sabtu, 23 Maret 2019	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dituntaskan	Proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah gempa di Nusa Tenggara Barat segera dituntaskan. Selain mencairkan dana hingga Rp 5,1 triliun, pemerintah juga akan mengawal langsung pembangunan kembali ratusan ribu rumah warga yang rusak akibat gempa yang terjadi Juli lalu. Untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, Presiden Joko Widodo kembali berkunjung ke NTB, Jumat (22/3/2019). Didampingi Nyonya Iriana, Presiden Jokowi berdialog dengan penyintas gempa di Gedung Hakka, Kabupaten Lombok Barat.
5	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Senin, 25 Maret 2019	Kelanjutan Seksi 5 Pandaan-Malang	Kelanjutan pembangunan jalan tol Pandaan-Malang seksi 5 akan ditentukan pekan ini terkait dengan penemuan situs cagar budaya yang berada di sisi ruas sepanjang 3,11 kilometer tersebut pada 6 Maret lalu. Kendati begitu, kata Dirut PT Jasa Marga Tbk. Desi Arryani, perseroan mengharapkan agar keberadaan situs tersebut dilestarikan sehingga bisa menjadi tujuan wisata baru di kota Malang.
6	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Senin, 25 Maret 2019	Konstruksi Cisumdawu Lambat	Badan Pengatu Jalan Tol mengaku bahwa pengerjaan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sedikit terhambat karena adanya kehati-hatian dalam pembangunan proyek tersebut. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan bahwa untuk meningkatkan progres konstruksi fisik dari tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) diperlukan adanya percepatan.
7	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Senin, 25 Maret 2019	Inkindo Dorong Penerbitan Peraturan Presiden	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia akan mengadakan rapat kerja nasional dalam waktu dekat untuk membahas sejumlah hal prioritas terkait dengan pengembangan dan pembinaan jasa konsultan ke depan. Ketua Umum DPN Inkindo Peter Frans mengatakan bahwa dalam rakernas akan dibahas beberapa hal termasuk percepatan penerbitan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Jasa Konsultan di Indonesia.

8	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Senin, 25 Maret 2019	Jasa Tirta II Perluas Wilayah Operasi	Perum Jasa Tirta II berniat mengelola tiga bendungan tahun ini sejalan dengan rencana perluasan wilayah kerja sehingga membuat perannya dalam mengelola sumber daya air kian besar. Direktur Utama Perum Jasa Tirta II U. Saefudin Noer mengatakan bahwa wilayah operasi perseroan akan diperluas hingga ke Banten dan Lampung.
9	Bisnis Indonesia (halaman 8)	Senin, 25 Maret 2019	Tol Layang Jakarta-Cikampek Diharapkan Fungsional	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengharapkan tol elevated Jakarta- Cikampek Km. 26 sudah bias digunakan secara fungsional pada puncak arus mudik Hari Raya Idulfitri 2019. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan bahwa pada saat ini jalan tol untuk mudik Lebaran yang belum ke tahap finalisasi tinggal menyisakan tol elevated atau jalan tol layang.
10	Bisnis Indonesia (halaman 23)	Senin, 25 Maret 2019	Citra Maja Tunda Peluncuran	Rencana PT Ciputra Residence, pengembangan proyek Citra Maja Raya, melepas 1.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tertunda lantaran keputusan kenaikan harga rumah FLPP dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum turun. Direktur PT Ciputra Residence Mary Octo Sihombing membenarkan jika tahun lalu perusahaan menargetkan untuk membangun 1.000 rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi kala itu masih ada hal-hal yang belum pasti terkait dengan spesifikasi dan dimensi dengan Kementerian PUPR.
11	Bisnis Indonesia (halaman 2)	Sabtu, 23 Maret 2019	Jalan Keluar Proyek Air Bersih Tahan Bencana	Perhatian khalayak terkait bencana alam dan dampak yang ditimbulkan makin meningkatkan dalam beberapa decade terakhir. Indonesia sebagai negara yang berada di gugusan Ring of Fire, tampaknya perlu lebih waspada. Hal ini dikarenakan populasi penduduk yang tinggal di Kawasan permukiman yang tidak terencana makin tinggi, dan degradasi lingkungan akibat perubahan iklim bertambah ekstrem. Memang, bencana alam dapat datang kapan saja tanpa bias diprediksi. Namun, bukan berarti tidak dapat dimitigasi dengan cepat.
12	Bisnis Indonesia (halaman 10)	Sabtu, 23 Maret 2019	Penggunaan Air Tanah DKI Bakal Disetop 2020	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menghentikan penggunaan air tanah di DKI Jakarta pada 2020 dan menggantinya dengan air permukaan guna mengatasi masalah penurunan permukaan air tanah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemerintah bakal memberhentikan suplai air tanah di Ibu Kota lantaran terus terjadi penurunan permukaan tanah tiap tahunnya.
13	Bisnis Indonesia (halaman 11)	Sabtu, 23 Maret 2019	Jabar Terbitkan Peketapan Lokasi	Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan surat penetapan lokasi atau penlok untuk proyek tol Jakarta-Cikampek atau Japek II Selatan kendati masih ada ganjalan dalam perizinan lahan milik Perhutani. Sekda Jabar Iva Karniwa mengatakan, penlok tersebut akan langsung digunakan pihak PT Jasa Marga Japek Selatan (JJS) untuk membebaskan kebutuhan lahan sekitar 700 hektare. Dengan adanya penlok, proses pembangunan fisik bias segera dimulai.

Judul	Banjaratma Jadi Etalase Produk Lokal	Tanggal	Minggu, 24 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 8)		
Resume	Tempat istirahat dan pelayanan atau TIP 260OB (rest area) Banjaratma pada ruas Tol Pajagan-Pemalang Kilometer 260 di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi percontohan dalam menjajakan produk local usaha mikro, kecil, dan menengah. Diuji coba sejak pekan lalu, rest area itu ditargetkan beroperasi penuh pada masa mudik Lebaran 2019. Dari pantauan, Sabtu (23/3/2019), sejumlah pelaku UMKM telah menjual produk khas Brebes dan sekitarnya di gerai yang tersedia di TIP 260B, seperti telur asin, bawang goreng, poci, dan pakaian. Namun, beberapa bagian belum di manfaatkan karena dalam proses renovasi.		

## TEMPAT ISTIRAHAT TOL

# Banjaratma Jadi Etalase Produk Lokal

**BREBES, KOMPAS** — Tempat istirahat dan pelayanan atau TIP 260B (*rest area*) Banjaratma pada ruas Tol Pejagan-Pemalang Kilometer 260 di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi percontohan dalam menjajakan produk lokal usaha mikro, kecil, dan menengah. Diuji coba sejak pekan lalu, *rest area* itu ditargetkan beroperasi penuh pada masa mudik Lebaran 2019.

Dari pantauan, Sabtu (23/3/2019), sejumlah pelaku UMKM telah menjual produk khas Brebes dan sekitarnya di gerai yang tersedia di TIP 260B, seperti telur asin, bawang goreng, poci, dan pakaian. Namun, beberapa bagian bangunan belum dimanfaatkan karena dalam proses renovasi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno di sela-sela Sosialisasi Aplikasi "Link Aja" Melalui Pangan Murah untuk Masyarakat di TIP 260B, kemarin, mengatakan, pembangunan *rest area* itu sesuai arahan presiden.

UMKM harus dilibatkan di *rest area* sejumlah tol di Indonesia.

"Presiden bilang, jangan sampai jalan tol mematikan UMKM. Kami upayakan agar jalan tol yang dimiliki BUMN ini memberi kesempatan bagi industri UMKM melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes," ujar Rini. Ia menambahkan, pelaku UMKM di TIP 260B tidak dikenai biaya selama enam bulan pertama.

TIP 260B dengan total luas lahan 10,4 hektar memanfaatkan bangunan bekas Pabrik Gula Banjaratma yang dikelola PTPN IX dan tak lagi dipakai sejak tahun 1997. Ciri khas bangunan, yakni susunan bata merah, tetap dipertahankan. Di situ juga tengah dibangun SPBU dan masjid.

TIP 260B dikembangkan bersama oleh enam perusahaan BUMN, yakni PT Jasa Marga, PT PP, PT PP Properti, PTPN IX, PT RNI, dan PT Waskita Karya. Total investasi Rp 170 miliar. Pembangunan

TIP ini sekaligus merupakan optimalisasi dari aset perusahaan BUMN.

Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Lukman Hidayat mengatakan, pembangunan TIP ini untuk destinasi wisata. "*Rest area* ini berbeda dari yang lain karena bangunannya *heritage*," katanya.

Direktur PT PP Sinergi Banjaratma, yang mengelola kawasan TIP 260B, Rachmat Priyatna mengatakan, total ada 125 UMKM dan 17 non-UMKM. Pada masa uji coba hingga beroperasi penuh, TIP 260B buka pada pukul 09.00 hingga pukul 17.00. Ke depan, TIP 260B akan buka 24 jam guna melayani pengguna jalan tol.

Rachmat menambahkan, selama enam bulan ini, pelaku UMKM di TIP 260B hanya dikenai biaya kebersihan, keamanan, dan listrik.

Penjual telur asin Brebes, Rosid (63), berharap TIP 260B ke depan kian ramai dikunjungi. (DIT)

Judul	Normalisasi Ciliwung Mandek Dua Tahun	Tanggal	Sabtu-Minggu, 23-24 Maret 2019
Media	Koran Tempo (halaman 6)		
Resume	Proyek atau perbaikan normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta mandek sejak 2017. Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bambang Hidayah, hal itu terjadi karena pemerintah DKI tak kunjung menyelesaikan pembebasan lahan di bantaran kali tersebut.		

# Normalisasi Ciliwung Mandek Dua Tahun

BBWSCC akan melaksanakan permintaan Anies untuk naturalisasi jika memungkinkan.

**Inge Klara Safitri**

[inge.klara@tempo.co.id](mailto:inge.klara@tempo.co.id)

**JAKARTA** — Proyek perbaikan atau normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta mandek sejak 2017. Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bambang Hidayah, hal itu terjadi karena pemerintah DKI tak kunjung menyelesaikan pembebasan lahan di bantaran kali tersebut.

Dia menuturkan tahun ini pun dipastikan proyek normalisasi kembali tak bisa digarap dan BBWSCC tak mengaloka-

sikan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Di lain pihak, Gubernur DKI Anies Baswedan menginginkan proyek diubah menjadi naturalisasi atau perbaikan sungai tanpa beton. Namun, Bambang mengungkapkan, pemerintah daerah belum menjelaskan secara teknis pelaksanaan naturalisasi.

“Baru secara implisit. Secara rinci bagaimana atau realisasinya, belum ada,” ucapnya kepada *Tempo*, kemarin.

Bambang menjelaskan bahwa dia memahami keinginan DKI, yakni membenahan kali secara natural tanpa perlu membeton bagian kiri-kanan

sungai seperti normalisasi. Pinggiran sungai akan dipasang batu kali. Namun, metode tersebut bisa direalisasi untuk sungai dengan luas tertentu. Faktanya, sungai-sungai di Jakarta sempit disertai rumah-rumah di bantarnya sehingga naturalisasi sulit dilakukan. “Kecuali rumah-rumah di bantaran sungai dipindahkan.”

Meski begitu, BBWSCC tetap bakal melanjutkan proyek normalisasi Ciliwung dengan mengutamakan konsep naturalisasi seperti yang diinginkan Anies jika memungkinkan. Menurut Bambang, pemerintah DKI sepakat dengan tawaran itu.

“Iya, sudah oke. Sudah mau terima, lah. Karena saya menjelaskan (naturalisasi) tergantung *space*-nya,” kata Bambang.

Pengendalian banjir di



**Gubernur Anies Baswedan meninjau Sungai Ciliwung di kawasan Condet, Jakarta, 11 November lalu.**

Jakarta menjadi perhatian pemerintah pusat. Maka pemerintah pusat, melalui BBWSCC, bekerja sama dengan pemerintah DKI dalam program perbaikan sungai untuk menghalau banjir. Dalam proyek tersebut, pemerintah DKI bertugas membebaskan lahan, sedangkan pengerjaan perbaikan sungai tanggung jawab BBWSCC.

Gubernur Anies enggan menanggapi mangkraknya proyek perbaikan

Ciliwung dan keinginannya naturalisasi sungai. Dia menyatakan telah berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum Basoeki Hadimoeljono mengenai pelaksanaan naturalisasi Ciliwung. "Sudah dikerjakan bareng-bareng, jangan diadulah," ujar Anies.

Dia mengklaim pembebasan lahan, yang menjadi bagian tugas pemerintah DKI, terus berjalan meski menghadapi sejumlah kendala. Masalah tersebut an-

tara lain, pada Desember tahun lalu pembebasan lahan di Cipinang Melayu terhambat karena warga menolak tawaran harga dari DKI. Maka dilakukanlah penilaian bersama Kementerian Keuangan untuk mendapatkan harga yang tak merugikan warga.

"Pemerintah tak bisa semena-mena menentukan harga tanah," ucap Anies.

● LANI DIANA | M. JULNIS FIRMANSYAH |  
INGE KLARA

Judul	Masih Ada Yang Tertinggal	Tanggal	Sabtu, 23 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 10)		
Resume	Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menekankan keadilan, kesetaraan, dan memiliki motto <i>no one left behind</i> . Semua harus menikmati semua. Maka, Hari Air Sedunia tahun 2019 diperingati tiap tanggal 22 Maret mengusung tema "Tak Meninggalkan Siapa Pun". Sasaran ke-6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni memastikan tercapainya ketersediaan dan pengelolaan air berkelanjutan bagi semua orang pada 2030. Target itu bermakna: tak seorang pun boleh tertinggal, semua mendapatkan.		

# Masih Ada yang Tertinggal

*Air bagi semua dan tak boleh seorang pun tidak mendapatkannya. Itu sulit tercapai jika melihat realitas komodifikasi air sebagai barang ekonomi dan akses tak merata. Hak asasi atas air jauh dari jangkauan.*

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menekankan keadilan, kesetaraan, dan memiliki motto *no one left behind*. Semua harus menikmati semua. Demikian juga tentang air. Air ialah sumber kehidupan dan kebutuhan dasar makhluk hidup. Maka, Hari Air Sedunia tahun 2019 diperingati tiap tanggal 22 Maret mengusung tema "Tak Meninggalkan Siapa Pun".

Sasaran ke-6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni memastikan tercapainya ketersediaan dan pengelolaan air berkelanjutan bagi semua orang pada 2030. Target itu bermakna: tak seorang pun boleh tertinggal, semua mendapatkan.

Pencanangan Hari Air Sedunia dilakukan sejak 1992, lebih dari tiga dekade lalu, tetapi hingga kini soal kebutuhan dasar hidup itu tak teratasi. Masalah ketersediaan air tak terbatas pada hal teknis, tetapi

ada beragam kepentingan, mulai dari soal ekonomi hingga politik. Di luar itu, persoalan lingkungan berkelindan di dalamnya.

Hak mendapat air minum yang aman dan bersih serta sanitasi pada 2010 diakui PBB sebagai hak asasi manusia untuk mendapat kenyamanan hidup. Hak itu berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi. Air harus tersedia cukup, aman, dapat diakses, serta terjangkau bagi pribadi dan rumah tangga. Kita bicara tentang air minum, sanitasi pribadi, air untuk mencuci baju, memasak, dan agar higienis bagi semua penduduk.

Menurut Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) Audrey Azoulay, sepertiga penduduk dunia tidak bisa menikmati jasa air minum yang aman. Hanya sekitar 40 persen menikmati sa-

nitasi yang aman.

Masalah air bersih bukan hal sederhana. Penyediaan air bersih dan sanitasi tak berdiri sendiri karena penentu tercapainya tujuan agenda lain, ketahanan energi dan pangan, serta pembangunan ekonomi dan lingkungan berkelanjutan.

Menurut Irwan Gunawan, Direktur Hutan dan Air Bersih WWF Indonesia, data pemerintah menyebut 82 persen sungai rusak dari 550 sungai di Indonesia. Padahal, air itu jadi sumber air minum, pertanian, dan industri. Air tak terkelola menyimpan konstanta berbahaya bagi kesehatan.

Seiring pembangunan berkelanjutan, setiap orang berhak mengakses air bersih. Agar itu tercapai, semua pemangku kepentingan, yakni pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan individu, perlu bekerja sama.

## Ideal versus realitas

Peringatan Hari Air Sedunia 2019 hanya berbicara ideal mesti dicapai dan mimpi menciptakan kesejahteraan umat manusia serta lingkungan berkelanjutan. Itu tak menyentuh realitas kehidupan sehari-hari.

Kebijakan penyediaan air bersih beragam dan beberapa kebijakan memerangkap warga dalam relasi industrial: produsen-konsumen. Dalam relasi transaksional itu, hanya sebagian warga menikmati air bersih karena air jadi komoditas.

"Pengelolaan air oleh perusahaan swasta menjadikan air sebagai barang ekonomi demi mencari untung," kata Dinda Nuur Annisaa Yura, Koordinator Program Solidaritas Perempuan, Jumat (22/3/2019), di Jakarta. Air tak dilihat sebagai hak asasi harus dipenuhi negara sebagai pemegang kewajiban dan bertanggung jawab memenuhi hak asasi war-

ganya.

Masalah ketersediaan air di Jakarta, misalnya, mencerminkan akses warga miskin dan warga mampu bayar mahal tak merata. Soal yang dihadapi Jakarta juga terjadi di area urban, yang pembangunannya didukung lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia yang berorientasi investasi dan pasar. Akibatnya, negara mengesampingkan pemenuhan hak asasi atas air bagi warganya.

Momentum Hari Air Sedunia makin kehilangan makna jika hanya mengemukakan kalimat idealis tanpa mengakui air jadi soal terstruktur secara ekonomi dan politik. Sebelum melihat ancaman lain ketidaktersediaan air akibat perubahan iklim, konflik, dan pengungsian massal. Berbicara tentang air ternyata tak lagi menyengkan.

(BRIGITTA ISWORO LAKSMI/  
ICHWAN SUSANTO)

Judul	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dituntaskan	Tanggal	Sabtu, 23 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 11)		
Resume	Proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah gempa di Nusa Tenggara Barat segera dituntaskan. Selain mencairkan dana hingga Rp 5,1 triliun, pemerintah juga akan mengawal langsung pembangunan kembali ratusan ribu rumah warga yang rusak akibat gempa yang terjadi Juli lalu. Untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, Presiden Joko Widodo kembali berkunjung ke NTB, Jumat (22/3/2019). Didampingi Nyonya Iriana, Presiden Jokowi berdialog dengan penyintas gempa di Gedung Hakka, Kabupaten Lombok Barat.		

## PASCA GEMPA NTB

# Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dituntaskan

**MATARAM, KOMPAS** — Proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah gempa di Nusa Tenggara Barat segera dituntaskan. Selain mencairkan dana hingga Rp 5,1 triliun, pemerintah juga akan mengawal langsung pembangunan kembali ratusan ribu rumah warga yang rusak akibat gempa yang terjadi Juli lalu.

Untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, Presiden Joko Widodo kembali berkunjung ke NTB, Jumat (22/3/2019). Didampingi Nyonya Iriana, Presiden Jokowi berdialog dengan penyintas gempa di Gedung Hakka, Kabupaten Lombok Barat.

Presiden juga meninjau pembangunan rumah tahan gempa di Lingkungan Pengempep Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Presiden meninjau rumah instan sederhana sehat (risha) yang tahan gempa.

Kepada penyintas gempa, Presiden kembali menegaskan komitmen menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi. "Uangnya sebenarnya sudah turun pada Desember Rp 3,5 triliun dan minggu kemarin Rp 1,6 triliun. Jadi, yang paling penting, uangnya Rp 5,1 triliun sudah ada di sini, tinggal warga mencairkan saja," ujarnya.

"Dua-tiga bulan lagi saya akan ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pastikan apa yang masih menjadi masalah, apa yang sudah diselesaikan. Jangan ragu, ka-



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

**Presiden Joko Widodo** meninjau lokasi pembangunan rumah tahan gempa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (22/3/2019). Selain meninjau pembangunan rumah tahan gempa, Presiden juga memantau pencairan dana bantuan bagi warga terdampak bencana gempa.

mi akan menyelesaikan semua," kata Presiden di hadapan ratusan penyintas gempa.

Komitmen itu kembali ditegaskan Presiden untuk meredam kekhawatiran warga akan mandeknya proses rehabilitasi jika pemerintahan berganti. "Sekarang ini tahun politik, di mana pilpres sebentar lagi dilaksanakan. Apakah proses ini akan terus berjalan, pengerjaan rumahnya,

dan lain-lain ketika Bapak Presiden tidak terpilih lagi?" kata Abdul Aziz, salah seorang warga.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 226.000 rumah rusak akibat gempa yang terjadi sejak Juli 2018 hingga Maret 2019. Untuk mempercepat pembangunan rumah tahan gempa, Presiden akan mengerahkan kelompok masyarakat dan

anggota TNI.

Upaya pemerintah membangun rumah tahan gempa itu ditanggapi positif oleh warga, khususnya penyintas bencana. Maryam yang rumahnya belum selesai dibangun, misalnya, mengaku senang mendapat bantuan dari pemerintah. Tanpa bantuan pemerintah, warga di sana tidak akan mampu membangun kembali rumah yang rusak berat akibat gempa. (NTA/RUL)

Judul	<b>Kelanjutan Seksi 5 Pandaan-Malang</b>	Tanggal	Senin, 25 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Kelanjutan pembangunan jalan tol Pandaan-Malang seksi 5 akan ditentukan pekan ini terkait dengan penemuan situs cagar budaya yang berada di sisi ruas sepanjang 3,11 kilometer tersebut pada 6 Maret lalu. Kendati begitu, kata Dirut PT Jasa Marga Tbk. Desi Arryani, perseroan mengharapkan agar keberadaan situs tersebut dilestarikan sehingga bisa menjadi tujuan wisata baru di kota Malang.		

# Kelanjutan Seksi 5 Pandaan–Malang

Bisnis, MALANG — Kelanjutan pembangunan jalan tol Pandaan–Malang seksi 5 akan ditentukan pekan ini terkait dengan penemuan situs cagar budaya yang berada di sisi ruas sepanjang 3,11 kilometer tersebut pada 6 Maret lalu.

Kendati begitu, kata Dirut PT Jasa Marga Tbk. Desi Arryani, perseroan mengharapkan agar keberadaan situs tersebut dilestarikan sehingga bisa menjadi tujuan wisata baru di Kota Malang.

“Situs itu ada di ujung 3 kilo [kilometer] terakhir. Minggu depan [pekan ini] akan difinalkan dari BPJT [Badan Pengatur Jalan Tol], [Kementerian] PUPR apa yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi situs tersebut,” ujarnya se usai melepas peserta sepeda dan lari santai dalam acara Festival Jalan Tol Ruas Pandaan–Malang di gerbang tol

Singosari, Sabtu (23/3).

Acara yang diikuti oleh 6.471 peserta itu dihadiri antara lain Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Anita Firmanti E.S. dan pejabat setempat.

Sejak penemuan situs di seksi 5 jalan tol Pandaan–Malang pada 6 Maret 2019, 2 hari berselang, PT Jasamarga Pandaan Malang menghentikan sementara pembangunannya dan masih berlangsung sampai dengan saat ini.

Secara keseluruhan, pembangunan jalan tol Pandaan–Malang sepanjang 38,50 kilometer terbagi dalam lima seksi. Seksi 1 menghubungkan Pandaan hingga Purwodadi sepanjang 15,47 kilometer, kemudian seksi 2 dari Purwodadi menuju Lawang sejauh 8,05 kilometer.

Dari Lawang, pembangunan jalan tol berlanjut sepanjang 7,10 kilometer

ke Singosari di seksi 3. Seksi 4 dan 5, jalan tol terbentang 7,86 kilometer menghubungkan Singosari–Pakis–Malang.

Pembangunan jalan tol Pandaan–Malang menghabiskan biaya Rp5,90 triliun dan PT Jasamarga Pandaan Malang memiliki masa konsesi 35 tahun. PT Jasa Marga Tbk. memiliki saham 60% di perusahaan itu, sisanya dimiliki PT PP Tbk. sebesar 35% dan PT Sarana Multi Infrastruktur sebanyak 5%.

Dirut PT Jasamarga Pandaan Malang Agus Purnomo mengatakan kemungkinan opsi yang dipilih untuk melanjutkan pembangunan di seksi 5 adalah mengubah trase sehingga sedikit berbelok dari trase sebelumnya. “Mungkin bergeser 8 meter.”

Desi menambahkan bahwa pengoperasian seksi 1–3 sepanjang 30 kilometer

## Diputuskan Pekan Ini

paling lambat akan dilaksanakan pada awal Mei 2019. “[Pembangunan seksi 4 masih berjalan, kalau bisa sekalian [dioperasikan] lebih baik.”

Adapun, berkaitan dengan pentarifan jalan tol tersebut, Desi mengatakan hal itu belum diputuskan dan baru diketahui setelah uji layak jalan tol tersebut selesai. Namun, kata Agus, perusahaan akan mengajukan usulan tarif yang baru kepada pemerintah karena ada perubahan ruang lingkup pengerjaan proyek.

### SEI RAMPAH–TEBING TINGGI

Sementara itu, pada Minggu (24/3), PT Jasamarga Kualanamu Tol mengoperasikan ruas tol Sei Rampah–Tebing Tinggi sepanjang 9,30 kilometer di Sumatera Utara.

Ruas tol tersebut menghubungkan

Kualanamu–Tebing Tinggi yang mempunyai 7 seksi. Pengoperasian ruas tersebut merupakan seksi terakhir yang dioperasikan anak usaha PT Jasa Marga Tbk. itu.

“Hingga tanggal 21 April, ruas ini tidak dikenakan tarif. Jadi, memakai tarif Sei Rampah saja untuk masyarakat,” ujar Direktur Utama PT Jasamarga Kualanamu Tol Agus Suharjanto pada acara peresmian pengoperasian ruas Sei Rampah–Tebing Tinggi di Sei Rampah, Sumatera Utara.

Dia menjelaskan bahwa sejak 14 Maret 2019, Kementerian PUPR telah menerbitkan surat keputusan tentang tarif Sei Rampah–Tebing Tinggi. Besaran tarif yang diketok Rp982 per kilometer sehingga total tarif gerbang tol Tanjung Morawa hingga Tebing Tinggi mencapai Rp54.000. *(Kahfi/Zufriзал)*

Judul	<b>Konstruksi Cisumdawu Lambat</b>	Tanggal	Senin, 25 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Badan Pengatu Jalan Tol mengaku bahwa pengerjaan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sedikit terhambat karena adanya kehati-hatian dalam pembangunan proyek tersebut. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan bahwa untuk meningkatkan progres konstruksi fisik dari tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) diperlukan adanya percepatan.		

► JALAN TOL

# Konstruksi Cisumdawu Lan

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol mengakui bahwa pengerjaan jalan tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan sedikit terhambat karena adanya kehati-hatian dalam pembangunan proyek tersebut.

Krizia P. Kinanti  
krizia.putri@bisnis.com

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan bahwa untuk meningkatkan progres konstruksi fisik dari tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu) diperlukan adanya percepatan.

"Cisumdawu itu dari sisi Indonesia bentuknya adalah bentuk konstruksi fisik yang dikerjakan oleh loan China. Nah, memang

► Pemerintah daerah memiliki minat tinggi untuk mengembangkan daerah di sekitar tol tersebut.

yang kita lakukan perlu ada percepatan dari sisi Indonesia," ujarnya menjawab pertanyaan *Bisnis*, pekan lalu.

Danang mengatakan bahwa progres pengerjaan konstruksi agak melambat dikarenakan adanya kehati-hatian dalam penggunaan teknologi dalam proyek tersebut.

Pekerjaan konstruksi di jalan tol Cisumdawu terbilang menantang karena kontur tanah berbukitan. Bahkan, di seksi 2, pemerintah membangun terowongan kembar sepanjang 472 meter. Terowongan ini merupakan terowongan jalan tol pertama di Indonesia.

Meski begitu, menurut Danang, sampai dengan saat ini dari sisi progres pengerjaan tol Cisumdawu masih berjalan, bahkan dari



pemerintah daerah memiliki minat tinggi untuk mengembangkan daerah di sekitar tol tersebut.

"Dua minggu yang lalu, saya bertemu dengan Bupati Sumedang. Beliau menyatakan gimana sih kita bisa memaksimalkan *impact* dari Cisumdawu. Saya sampaikan tolong UKM-UKM yang ada di

Sumedang berpartisipasi di *rest area* yang dikembangkan di sepanjang itu," ujarnya.

**BAGIAN PEMERINTAH**

Proyek jalan tol Cisumdawu memiliki panjang 60,47 kilometer dan pembangunannya terbagi ke dalam enam seksi. Pemerintah,

# isumdawu Lambat



pemerintah daerah memiliki minat tinggi untuk mengembangkan daerah di sekitar tol tersebut.

"Dua minggu yang lalu, saya bertemu dengan Bupati Sumedang. Beliau menyatakan gimana *sih* kita bisa memaksimalkan *impact* dari Cisumdawu. Saya sampaikan tolong UKM-UKM yang ada di

Sumedang berpartisipasi di *rest area* yang dikembangkan di sepanjang itu," ujarnya.

**BAGIAN PEMERINTAH**

Proyek jalan tol Cisumdawu memiliki panjang 60,47 kilometer dan pembangunannya terbagi ke dalam enam seksi. Pemerintah,

kata Danang, menggarap dua seksi (seksi 1 dan 2) sepanjang 27,62 kilometer. Konstruksi dikerjakan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan kelayakan agar jalan tol tersebut layak secara finansial.

Sementara itu, empat seksi, seksi 3 hingga seksi 6 sepanjang 33,33 kilometer digarap oleh PT Citra

Karya Jabar Tol. Progres pembebasan lahan dan konstruksi di seksi 1 masing-masing mencapai 65,86% dan 14,26%.

Di seksi 2, fase pertama (6,35 kilometer) telah rampung pada 2017, sedangkan fase kedua (10,70 kilometer) telah mencapai 63,42%. □

Judul	<b>Inkindo Dorong Penerbitan Peraturan Presiden</b>	Tanggal	Senin, 25 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia akan mengadakan rapat kerja nasional dalam waktu dekat untuk membahas sejumlah hal prioritas terkait dengan pengembangan dan pembinaan jasa konsultan ke depan. Ketua Umum DPN Inkindo Peter Frans mengatakan bahwa dalam rakernas akan dibahas beberapa hal termasuk percepatan penerbitan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Jasa Konsultan di Indonesia.		

## ► JASA KONSULTAN

# Inkindo Dorong Penerbitan Peraturan Presiden

Bisnis, JAKARTA — Ikatan Nasional Konsultan Indonesia akan mengadakan rapat kerja nasional dalam waktu dekat untuk membahas sejumlah hal prioritas terkait dengan pengembangan dan pembinaan jasa konsultan ke depan.

Ketua Umum DPN Inkindo Peter Frans mengatakan bahwa dalam rakernas akan dibahas beberapa hal termasuk percepatan penerbitan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Jasa Konsultan di Indonesia.

“Kami ingin menggagas Perpres Pembinaan dan Pengembangan Usaha-Usaha Jasa Konsultan. Jadi, Inkindo di rakernas ini ingin mendorong terbitnya perpres ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/3).

Menurut Peter, saat ini konsultan itu terbagi dua rumpun, rumpun konstruksi dan rumpun nonkonstruksi.

Rumpun konstruksi sudah memiliki undang-undang yang

jas, tetapi rumpun nonkonstruksi tidak mempunyai peraturan yang jelas sehingga Inkindo menginginkan ada satu payung hukum untuk pembinaan dan pengembangan jasa konsultan.

“Nah, itulah kami ingin adanya, peraturan presiden pengganti undang-undang. Kenapa kami mau peraturan presiden? Kenapa tidak undang-undang? Karena undang-undang masih kejauhan, kelamaan, tidak masuk prolegnas [program legislasi nasional]. Jadi, tentunya perpres adalah urgensi. Kami perlu perpres sehingga inkindo mendorong tentang terbitnya Perpres Jasa Konsultan,” papar Peter.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi kementerian pembina bagi jasa konsultan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri PPN No. 4 Tahun 2018. Regulasi ini diterbitkan untuk mewujudkan jasa kon-

sultan yang andal, kompeten, dan profesional.

Selain itu, Inkindo juga akan membahas perihal *billing rate* karena saat ini untuk tamatan S-1 minimum Rp18 juta—Rp77 juta, bukan besaran uang yang diterima, padahal *billing rate* seharusnya adalah satu kesatuan gaji yang diterima.

“Rata-rata yang diterima dari tenaga ahli itu 50% dari *billing rate* minimum, kurang lebih ya, 40—60, anggaplah 50, dari Rp18 juta berarti Rp9 juta. Untuk 0 tahun pengalaman SKA [sertifikat keahlian] muda nah, SKA muda itu tentunya dia baru lulus.” katanya.

Dia mengakui bahwa sekarang ada percepatan sertifikasi pekerja konstruksi yang dilakukan Menteri PUPR. Namun, dari sebanyak 8 juta yang harus disertifikasi, yang memiliki SKA itu baru 250.000 tenaga ahli dari 1,2 juta yang ditargetkan Kementerian PUPR. (Krizia P. Kinanti)

Judul	Jasa Tirta II Perluas Wilayah Operasi	Tanggal	Senin, 25 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Perum Jasa Tirta II berniat mengelola tiga bendungan tahun ini sejalan dengan rencana perluasan wilayah kerja sehingga membuat perannya dalam mengelola sumber daya air kian besar. Direktur Utama Perum Jasa Tirta II U. Saefudin Noer mengatakan bahwa wilayah operasi perseroan akan diperluas hingga ke Banten dan Lampung.		

## ► SUMBER DAYA AIR

# Jasa Tirta II Perluas Wilayah Operasi

Bisnis, PURWAKARTA — Perum Jasa Tirta II berniat mengelola tiga bendungan mulai tahun ini sejalan dengan rencana perluasan wilayah kerja sehingga membuat perannya dalam mengelola sumber daya air kian besar.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II U. Saefudin Noer mengatakan bahwa wilayah operasi perseroan akan diperluas hingga ke Banten dan Lampung.

Selama ini, perusahaan beroperasi di Jawa Barat, mengelola 74 sungai dan anak sungai dengan area seluas 12.000 kilometer persegi. Sejak 50 tahun silam, Jasa Tirta II telah mengelola Bendungan Juanda atau Jatiluhur, bendungan berkapasitas besar di Indonesia.

Menurut Saefudin, perusahaan sedang menunggu penerbitan regulasi baru yang akan menjadi payung hukum perluasan wilayah kerja. Saat ini, operasional Jasa Tirta II diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7/2010. Pener-

bitan PP baru sebagai landasan hukum bagi perluasan wilayah kerja perusahaan diperkirakan terbit pada bulan depan.

“Sebagai perum, kami juga tetap bisa ekspansi. Waduk-waduk yang dibangun pemerintah bisa dikelola [oleh Jasa Tirta II],” ujarnya di Jatiluhur, Purwakarta, pekan lalu.

Pengelolaan sumber daya air, katanya, menjadi hal penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dia memberi contoh air dari Bendungan Juanda dialirkan untuk irigasi lahan pertanian di Jawa Barat dan sumber air baku utama bagi DKI Jakarta.

Berdasarkan Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II 2017, perseroan telah mengelola 8 miliar meter kubik air baku per tahun dari potensi sebanyak 13 miliar kubik per tahun. Sebanyak 90% dari jumlah itu disalurkan untuk irigasi 300.000 hektare lahan pertanian di Jawa Barat.

Perusahaan itu juga menyalurkan hampir 1 miliar meter kubik air baku untuk perusahaan daerah air minum dan industri.

Sementara itu, air bersih yang disalurkan pada 2017 mencapai 2,20 juta meter kubik.

Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta II Dadan Hidayat menambahkan, perluasan wilayah kerja membuat portofolio pengelolaan bendungan juga bertambah.

Dia menyebutkan bahwa perusahaan akan mengelola Bendungan Jatigede (Jawa Barat), Batutegi (Lampung), dan Karian (Banten). Bendungan Jatigede dan Batutegi saat ini sudah beroperasi, sedangkan Karian masih dalam tahap konstruksi.

Menurut Dadan, pengelolaan tiga bendungan itu tinggal menunggu penerbitan PP. “Jadi, wilayah kerjanya kami memegang Lampung, Banten, Cirebon. Kami juga propose Sumatra Selatan,” ujarnya. *(Rivki Maulana)*

Judul	<b>Tol Layang Jakarta-Cikampek Diharapkan Fungsional</b>	Tanggal	Senin, 25 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 8)		
Resume	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengharapkan tol elevated Jakarta- Cikampek Km. 26 sudah bias digunakan secara fungsional pada puncak arus mudik Hari Raya Idulfitri 2019. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan bahwa pada saat ini jalan tol untuk mudik Lebaran yang belum ke tahap finalisasi tinggal menyisakan tol elevated atau jalan tol layang.		

## ► MUDIK LEBARAN

# Tol Layang Jakarta-Cikampek Diharapkan Fungsional

Bisnis, BLITAR — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengharapkan tol elevated Jakarta-Cikampek Km. 46 sudah bisa digunakan secara fungsional pada puncak arus mudik Hari Raya Idulfitri 2019.

redaksi@bisnis.com

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan bahwa pada saat ini jalan tol untuk mudik Lebaran yang belum ke tahap finalisasi tinggal menyisakan tol *elevated* atau jalan tol layang.

"Sekarang progresnya tujuh puluh sekian persen. Kalau ini dibuka [fungsional] maka akan sangat membantu kami," ujarnya di sela-sela peresmian trayek baru bus non-ekonomi Blitar—Surabaya, di Blitar, Sabtu (23/3).

Namun, Budi masih belum bisa memastikan apakah penggunaan jalan tol *elevated* tersebut secara fungsional memungkinkan untuk mengantisipasi arus mudik mendatang.

Dia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga terkait dengan hal tersebut.

Sementara itu, terkait dengan arus mudik Lebaran 2019, Budi yakin tingkat kemacetan akan menurun drastis.

Dia menyebutkan bahwa jalan tol Trans Jawa sudah terbangun dari Jakarta hingga Surabaya dan dari Surabaya hingga Pandaan.

Menurutnya, untuk mudik Lebaran tahun ini, perhatian pemerintah sudah bukan lagi terkait dengan masalah kemacetan tetapi masalah keselamatan pemudik.

Budi mengatakan, pihaknya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan langkah-langkah menghadapi arus mudik Lebaran 2019.

"Kami sudah mulai berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan kalau dulu kami bicara kemacetan, sekarang yang kami antisipasi adalah keselamatan," ujarnya.

Sementara itu, perkembangan pembangunan infrastruktur jalan khususnya jalan tol telah berkembang cepat meskipun hal itu juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.

### BUS CEPAT

Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, juga menargetkan segera ber-

### ► Tingkat kemacetan Arus mudik Lebaran 2019 bakal menurun drastis.

operasinya layanan transportasi umum bus non-ekonomi jurusan Jakarta—Surabaya dan sebaliknya melalui jalan tol Trans Jawa.

"Namanya Bus Tol Trans Jawa jurusan Jakarta—Surabaya dan sebaliknya hanya melalui jalan tol. Sebelum Lebaran harus sudah beroperasi, paling telat April," ujar Budi se usai meresmikan trayek baru angkotan bus non-ekonomi jurusan Blitar—Surabaya, Sabtu (23/3).

Budi mengatakan bahwa minat dari penyedia armada bus sangat antusias khususnya dari kalangan swasta. Untuk tahap pertama, lanjutnya, akan disediakan 30 unit bus guna melayani trayek tersebut.

Bus jalan tol Trans Jawa ini akan menambah pilihan moda transportasi bagi masyarakat di tengah kenaikan harga tiket pesawat terbang. "Bus ini nanti waktu tempuhnya minimal harus sama dengan kereta api, kalau bisa lebih cepat malah," ujarnya.

Menurutnya, selain waktu tempuh yang cepat karena bus hanya akan melalui jalur tol juga harus menerapkan standar pelayanan yang prima.

"Ada standar unit busnya harus demikian, pelayanan kepada penumpang harus bagus, dan pengemudinya juga terlatih. Tidak boleh sembarang pengemudi," tambahnya.

Pembangunan infrastruktur jalan khususnya jalan tol, ujarnya, terbukti tidak hanya dinikmati oleh pengguna jalan yang menggunakan mobil pribadi.

Dia menunjuk pada dibukanya trayek bus Blitar—Surabaya dan sebaliknya yang juga memanfaatkan jalur tol sehingga dapat memangkas waktu tempuh Blitar—Surabaya hingga 1,5 jam dibandingkan dengan rute yang ada.

Dalam perkembangan lain, Kementerian Perhubungan dijadwalkan akan mengeluarkan peraturan menteri yang antara lain berisi penetapan tarif ojek *online* (ojol) pada hari ini, Senin (25/3), yang diharapkan menjadi titik temu antara pihak pengemudi dan aplikator.

Menurut Budi, PM No.12/2019 sudah selesai. "Kini tinggal implementasi saja, dan hari Senin Pak Menteri akan menyampaikan ke teman-teman asosiasi mengenai biaya jasa tarif dan semuanya," ujar Budi.

Menurutnya, pihaknya masih punya waktu untuk merancang berapa tarif minimal per kilometer, tarif terdekat berapa, kemudian juga tarif batas atasnya berapa.

Budi menjelaskan bahwa penetapan tarif ojol oleh Kementerian Perhubungan diberlakukan terhadap tiga zona yaitu: Zona 1 mencakup Sumatra, Jawa, dan Bali; Zona 2 mencakup Jabodetabek; dan, Zona 3 mencakup Indonesia bagian Timur.

Adapun untuk besaran tarif jarak tertentu (*flag fall*), lanjutnya, akan ditetapkan di kisaran Rp7.000—Rp10.000 per 4 atau 5 kilometer pertama.

"Kalau sekarang kan ada aplikator yang memberlakukan tarif Rp 4.000 untuk 4 kilometer pertama," jelasnya.

Menurut Budi, memang terdapat gap yang jauh antara tuntutan pengemudi ojol dengan usulan pihak aplikator untuk tarif kilometer selanjutnya.

Pengemudi ojol, lanjutnya, meminta tarif nett Rp 2.400 per kilometer sedangkan pihak aplikator mengajukan tarif di bawah Rp 2.000 per kilometer. "Kalau Rp 2.400 nett itu berarti gross sekitar Rp 3.000, menurut saya ini terlalu mahal," tuturnya.

Budi mengatakan bahwa regulasi Kemenhub terkait angkutan ojek online tersebut memuat empat hal yaitu masalah besaran tarif, masalah suspend, masalah perlindungan keselamatan dan keamanan mitra pengemudi, dan hubungan kemitraan antara pengemudi dan aplikator.

"Untuk masalah tarif akan dibuatkan SK terpisah agar memudahkan dilakukan evaluasi dan revisi. Jadi terutama untuk masalah tarif nanti akan dievaluasi setiap 3 bulan," jelasnya.

Budi mengharapkan bahwa setelah regulasi ditetapkan nanti akan menjadi titik temu dari semua *stakeholders* termasuk konsumen ojek *online*. (040) ■

Judul	Citra Maja Tunda Peluncuran	Tanggal	Senin, 25 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 23)		
Resume	Rencana PT Ciputra Residence, pengembangan proyek Citra Maja Raya, melepas 1.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tertunda lantaran keputusan kenaikan harga rumah FLPP dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum turun. Direktur PT Ciputra Residence Mary Octo Sihombing membenarkan jika tahun lalu perusahaan menargetkan untuk membangun 1.000 rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi kala itu masih ada hal-hal yang belum pasti terkait dengan spesifikasi dan dimensi dengan Kementerian PUPR.		

## ► RUMAH FLPP

# Citra Maja Tunda Peluncuran

Bisnis, RANGKASBITUNG — Rencana PT Ciputra Residence, pengembang proyek Citra Maja Raya, melepas 1.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tertunda lantaran keputusan kenaikan harga rumah FLPP dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum turun.

Direktur PT Ciputra Residence Mary Octo Sihombing membenarkan jika tahun lalu perusahaan menargetkan untuk membangun 1.000 rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi kala itu masih ada hal-hal yang belum pasti terkait dengan spesifikasi dan dimensi dengan Kementerian PUPR.

"Jadi, target itu tertunda. Saat ini, kami akan mulai menjual rumah dengan skema FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan] sudah dibuka klaster satu, semua sudah dibangun, sudah siap, tetapi kami tunda peluncurannya sampai pemerintah putuskan harga jualnya," katanya ketika ditemui di kantor pemasaran Citra Maja Raya, Jumat (22/3).

Perumahan FLPP merupakan program Kementerian PUPR untuk membantu MBR agar bisa mengakses kredit kepemilikan rumah.

Sebelumnya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heri Djulipoerwanto mengatakan bahwa skema kebijakan batasan penerima FLPP untuk MBR dengan gaji maksimal Rp8 juta per bulan dikhususkan untuk kategori rumah tapak.

Meningkatnya batas gaji penerima FLPP dari maksimal Rp4 juta menjadi Rp8 juta ini rencananya masuk ke dalam revisi Peraturan Menteri PUPR No. 26/PRT/M/2016 dan Keputusan Menteri PUPR No. 552/KPS/M/2016. Namun, hingga pekan lalu revisi kedua Permen PUPR tersebut belum juga turun.

Oleh karena itu, pada Sabtu (23/3), Citra Maja Raya telah membuka 400 unit rumah MBR non-FLPP dengan harga mulai dari Rp119 juta per unit.

Direktur PT Ciputra Residence Agusurja Widjaja menegaskan bahwa harga hunian yang ditawarkan memang sudah di bawah harga plafon dari pemerintah untuk mewujudkan skema FLPP. Namun, dikarenakan skema tersebut banyak batasannya, Citra Maja Raya tidak bisa menjual begitu saja.

"Rumah harga segitu kan yang mau dan yang beli campur-campur, sedangkan ada batasan gaji harus Rp4 juta, harus rumah pertama. Jadi, sukar kalau kami khususnya pakai FLPP. Sudah kami sediakan klaster khusus FLPP, tetapi penjualannya harus dibedakan, jadi dua segmen karena banyak juga yang *enggak* pakai skema itu walaupun harga dan lokasinya sudah memenuhi syarat FLPP."

Tahun ini, Citra Maja Raya menargetkan penjualan keseluruhan Rp800 miliar hingga Rp1 triliun dengan 6.000 rumah siap diserahkan tahun ini dari keseluruhan 15.000 unit.

"Kami gencar serah terima baru awal tahun lalu, setiap bulan yang menghuni makin banyak dan cepat. Jadi, kami juga harus melengkapinya dengan beragam fasilitas seperti sekolah, restoran, ruko, supaya konsumen bisa megghuni lebih cepat," lanjut Agusurja.

## BERBASIS TOD

Selain itu, PT Ciputra Residence bersama PT Hanson International Tbk. dan PT Bhuwanatala Indah Permai akan berfokus pada pengembangan kota mandiri berbasis kawasan terintegrasi dengan transportasi (*transit oriented development/TOD*).

Octo mengungkapkan bahwa saat ini, Citra Maja Raya masih difokuskan untuk dikembangkan sebagai TOD, melihat jarak dari gerbang utama menuju ke Stasiun Commuter Line Maja yang hanya berjarak 500 meter.

"Moda transportasi utama di sini masih kereta api Commuter Line. Dari Maja ke Tanah Abang cuma 1,5 jam. Saat ini, kami benahi pemadu moda ke stasiun dari klaster hunian, kami sudah bikin *shuttle*-nya dan sedang merintis transportasi dari Maja ke Tangerang," ujarnya.

Menurutnya, transportasi berbasis rel saat ini menjadi pilihan utama karena selain dekat, juga waktu tempuhnya sudah bisa dipastikan sehingga mempermudah pula untuk mengatur pembangunan *shuttle bus* ke depannya. (Mutiar Nabila)

Judul	Jalan Keluar Proyek Air Bersih Tahan Bencana	Tanggal	Sabtu, 23 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 2)		
Resume	Perhatian khalayak terkait bencana alam dan dampak yang ditimbulkan makin meningkat dalam beberapa decade terakhir. Indonesia sebagai negara yang berada di gugusan Ring of Fire, tampaknya perlu lebih waspada. Hal ini dikarenakan populasi penduduk yang tinggal di Kawasan permukiman yang tidak terencana makin tinggi, dan degradasi lingkungan akibat perubahan iklim bertambah ekstrem. Memang, bencana alam dapat datang kapan saja tanpa bias diprediksi. Namun, bukan berarti tidak dapat dimitigasi dengan cepat.		

## Jalan Keluar Proyek Air Bersih Tahan Bencana

Perhatian khalayak terkait bencana alam dan dampak yang ditimbulkan makin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia sebagai negara yang berada di gugusan *Ring of Fire*, tampaknya perlu lebih waspada.

Hal ini dikarenakan populasi penduduk yang tinggal di kawasan permukiman yang tidak terencana makin tinggi, dan degradasi lingkungan akibat perubahan iklim bertambah ekstrem. Memang, bencana alam dapat datang kapan saja tanpa bisa diprediksi. Namun, bukan berarti tidak dapat dimitigasi dengan cermat.

Hal yang paling diperlukan di tempat yang rawan bencana seperti di Tanah Air selain proses mitigasi yang matang dan cara evakuasi korban secara efektif, adalah penyediaan air bersih tahan bencana. Selama ini, masalah air bersih seringkali luput dari perhatian.

Padahal, saat terjadi bencana, banyak sumber air yang rusak berat. Sekali saja terjadi gangguan pada sistem instalasi pengolahan air bersih dan pipa distribusi air, maka para korban bencana tidak mendapatkan akses air bersih. Kualitas air berubah keruh atau terasa asin.

Prioritas penanganan air bersih biasanya didahulukan pada sejumlah

wilayah pengungsian dengan sistem komunal. Mengingat kebutuhan korban bencana untuk mandi, mencuci, dan toilet yang cukup besar.

Kini, masalah sistem penyediaan air minum (SPAM) tahan bencana ini menjadi prioritas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR menyadari bahwa infrastruktur SPAM merupakan hal dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah rawan bencana maupun pascabencana.

Bahkan, baru-baru ini, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menyatakan bahwa begitu mendesaknya penerapan pembangunan SPAM dengan memasukkannya ke dalam kebijakan dan strategi nasional, serta penanggulangan bencana.

Pembangunan jaringan pipa dan kelengkapannya, termasuk jembatan pipa harus disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana, baik bencana alam dan non-alam.

Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa sampai saat ini masih banyak bangunan SPAM yang belum memiliki perencanaan konstruksi yang tahan bencana, terutama pada jaringan pipa, baik dari sisi transmisi maupun distribusi.

Selama ini, teknologi penyediaan

air bersih untuk kondisi tanggap darurat baru memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, fleksibel dan dapat dioperasikan dengan beragam kondisi air. *Kedua*, dapat dioperasikan dengan mudah.

*Ketiga*, tidak perlu membutuhkan perawatan yang rumit. *Keempat*, sedikit menggunakan bahan kimia, dan *kelima*, mudah dipindahkan.

Seluruh karakteristik tersebut ternyata tidak cukup diaplikasikan di negara yang berada pada garis Cincin Api. Apalagi jika dibangun dengan format yang tidak tahan terhadap bencana alam. Jika sedikit saja luput dari perhatian, maka sumber air yang tidak terlindungi akan berisiko terkontaminasi bibit penyakit dan menyebar dengan cepat di masyarakat.

Upaya untuk membangun SPAM yang tahan bencana ternyata tidak hanya cukup dengan memberikan payung berupa kebijakan dan diintegrasikan dengan sistem tanggap darurat bencana saja.

Kembali lagi masalah klasik berupa pendanaan menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Kementerian PUPR mengakui bahwa pembangunan SPAM tahan bencana tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Mengingat alokasi anggaran

penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, hingga penanganan dan pembangunan kembali infrastruktur juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meskipun dalam lingkup yang terbatas.

Selain mendorong kontribusi dari pemerintah daerah, juga terbuka kesempatan bagi investor daerah untuk terlibat dalam pembangunan SPAM. Pemerintah bahkan menawarkan dua skema pengusahaan SPAM kepada badan usaha guna meningkatkan akses penyediaan air bersih kepada masyarakat.

Investor dapat menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau skema *business to business* (B to B). Kementerian PUPR mencatat, kebutuhan pendanaan untuk memenuhi akses air minum 100% mencapai Rp253,8 triliun.

Harian ini menilai bahwa selain berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur SPAM tahan bencana juga harus melakukan pengawasan terhadap para operator. Para pihak perlu mengawasi pelatihan keterampilan para operator pengawas SPAM dalam memastikan dan menjamin seluruh peralatan pengolahan air berjalan baik sehingga ketika terjadi musibah dapat tetap berfungsi. ■

Judul	<b>Penggunaan Air Tanah DKI Bakal Disetop 2020</b>	Tanggal	Sabtu, 23 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 10)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menghentikan penggunaan air tanah di DKI Jakarta pada 2020 dan menggantinya dengan air permukaan guna mengatasi masalah penurunan permukaan air tanah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemerintah bakal memberhentikan suplai air tanah di Ibu Kota lantaran terus terjadi penurunan permukaan tanah tiap tahunnya.		

► PENURUNAN PERMUKAAN TANAH

# Penggunaan Air Tanah DKI Bakal Disetop 2020

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menghentikan penggunaan air tanah di DKI Jakarta pada 2020 dan menggantinya dengan air permukaan guna mengatasi masalah penurunan permukaan air tanah.

Krizia Putri Kinanti  
krizia.putri@bisnis.com

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemerintah bakal memberhentikan suplai air tanah di Ibu Kota lantaran terus terjadi penurunan permukaan tanah tiap tahunnya.

Adapun, air di Jakarta saat ini bersumber Perum Jasa Tirta II (PJT 2) Jatiluhur dengan kapasitas air baku sebanyak 16 meter kubik per detik.

Sementara itu, Kementerian PUPR akan mengembangkan neraca air (*water balance*) dari suplai sebanyak 10 meter kubik—15 meter kubik per detik yang masih bisa diolah menjadi pasok air bersih di Jakarta.

"Sekarang ini mereka pakai air tanah maknanya turun terus muka tanahnya. Nanti, kalau sudah ada tambahan dari Jatiluhur dan Karian, kita setop [penggunaan] air tanah. Satu-satunya jalan adalah [menyetop] penggunaan air tanah untuk bisa menahan [laju] penurunan permukaan tanah di Jakarta. Bagaimana bisa kita menyetop air tanah? [Caranya], kita tambah dulu airtanya," ujar Basuki di Jakarta, Jumat (22/3).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, kementeriannya juga masih mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian yang ditargetkan selesai pada 2020.

SPAM tersebut rencananya akan dipakai untuk memasok air ke kawasan Tangerang—Jakarta dan sekitarnya dengan total kapasitas sebanyak 4,5 meter kubik per detik.

Dengan demikian, pasokan air bersih di Ibu Kota dan sekitarnya diharapkan dapat tercukupi tanpa harus menggunakan air tanah.

"Penghentian [penggunaan] air tanah [di

► Penggunaan air tanah di DKI Jakarta rencananya disetop per 2020, setelah SPAM Karian dirampungkan.

► Penurunan muka tanah paling parah terjadi di Jakarta Utara, yaitu sedalam 25 cm per tahun.

## Demi Ketahanan Air Nasional



### Bendungan yang Telah Selesai Konstruksi

Bendungan Rajul (Aceh), Jatigede (Jawa Barat), Bajulmeti (Jawa Timur), Nipah (Jawa Timur), Tirab (Bali), Paya Seunara (Aceh) Teritip (Kalimantan Timur), Raknomo Tanjung (NTB), Mita (NTT), Rotiklod (NTT), Logung (Jateng), Sei Gong (Kepri), dan Slingangheula (Banten).

### Bendungan yang Ditrgetkan Rampung 2019

Bendungan Gongsgang, Karaloe, Tapin, Passeloreng, Bintang Bano, Way Sekampung, Ladongi, Napun Gete, Clawi, Sukamahi, Karian, Keureuto, Gondang, Marangkayu, dan Kuningan.

### Bendungan yang Mulai Pembangunan 2019

Bendungan Jenelata, Pelosika, Jragung, Digoel, Tiro, Mbay, Budong-Budong, Amerora, Tiu Suntuik dan Bulanqo Ulu.

Sumber: Bappenas, dilatih

BISNIS/VIKAS HORRANAKA

Jakarta] ini efektif karena ada *best practice*-nya. Bangkok sudah menyetop air tanah. Kalau [Jakarta] sudah terpenuhi [pasokan air dari SPAM Karian], pasti kita setop [air tanah]. Terutama, di semua wilayah utara dan pusat Jakarta yang [permukaan tanahnya] turun itu."

Sekadar catatan, SPAM Karian akan mengandikan pasokan air dari Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten. Per Desember 2018, progres konstruksi bendungan telah mencapai 55% dan ditargetkan rampung pada 2020. Air baku dari Bendungan Karian akan dialirkan melalui jaringan perpipaan sepanjang 47,9 kilometer.

Berdasarkan hasil kajian dari peneliti geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas, sejumlah wilayah di Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah.

Jakarta Utara mengalami penurunan 25 cm per tahun, Jakarta Barat 15 cm per tahun, Jakarta Timur 10 cm per tahun, Jakarta Pusat 2 cm per tahun, dan Jakarta Selatan 1 cm per tahun.

"Penyebab penurunan muka tanah adalah adanya pengambilan air tanah yang berlebih, sehingga harus ada solusi untuk

menghentikannya."

Dia memprediksi, pada 2050 Jakarta Utara bisa tenggelam bila penurunan permukaan tanah terus berlanjut.

### KURANG SUPLAI

Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi membenarkan, selama ini Jakarta kekurangan suplai air permukaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Dia menambahkan, setelah Waduk Karian selesai dibangun, pasokan air akan ditransmisikan ke Jakarta dan dibagi ke beberapa daerah. Adapun, anggaran untuk sistem transmisi ini direncanakan menggunakan pinjaman dari Korea Selatan.

Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Entus Asnawi mengatakan, perusahaan masih membahas beragam usulan dalam prakarsa proyek SPAM Karian.

"Kami masih menunggu karena itu harus mendapat persetujuan untuk mendapat [izin] prakarsa," ujarnya.

Dia menambahkan, perseroan menyiapkan dana sejumlah Rp1 triliun untuk investasi di SPAM Karian. □

Judul	Jabar Terbitkan Peketapan Lokasi	Tanggal	Sabtu, 23 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 11)		
Resume	Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan surat penetapan lokasi atau penlok untuk proyek tol Jakarta-Cikampek atau Japek II Selatan kendati masih ada ganjalan dalam perizinan lahan milik Perhutani. Sekda Jabar Iva Karniwa mengatakan, penlok tersebut akan langsung digunakan pihak PT Jasa Marga Japek Selatan (JJS) untuk membebaskan kebutuhan lahan sekitar 700 hektare. Dengan adanya penlok, proses pembangunan fisik bias segera dimulai.		

## ► TOL JAKARTA-CIKAMPEK II SELATAN

# Jabar Terbitkan Penetapan Lokasi

**Bisnis, BANDUNG** — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan surat penetapan lokasi atau penlok untuk proyek tol Jakarta—Cikampek atau Japek II Selatan kendati masih ada ganjalan dalam perizinan lahan milik Perhutani.

[redaksi@bisnis.com](mailto:redaksi@bisnis.com)

Sekda Jabar Iva Karniwa mengatakan, penlok tersebut akan langsung digunakan pihak PT Jasa Marga Japek Selatan (JJS) untuk membebaskan kebutuhan lahan sekitar 700 hektare. Dengan adanya penlok, proses pembangunan fisik bisa segera dimulai.

"Alhamdulillah untuk masalah yang sifatnya pembebasan lahan penlok sudah diterbitkan oleh Pak Gubernur, sekarang bisa digunakan untuk pembebasan lahan," ungkapnya di Gedung Sate, Jumat (22/3).

Menurutnya, dalam rapat terakhir, meskipun penlok sudah lahir, masih ada beberapa hal yang perlu penyelesaian secara normatif terkait dengan proses perizinan penggunaan lahan Perhutani.

Iwa menjelaskan, PT Jasa Marga Japek Selatan harus menempuh satu proses administrasi. "Tadi kita undang Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup karena menyangkut Amdal," ujarnya.

Pemprov Jabar dan pihak Badan Usaha Jalan Tol untuk urusan lahan Perhutani mencapai kesepakatan untuk melaksanakan

secara normatif proses pembebasan lahan. Proses pertama, kata Iwa, BUJT harus mengantongi persetujuan tertulis terkait dengan penggunaan lahan dari direksi Perhutani. "Tahapan berikutnya rekomendasi [pembebasan lahan Perhutani] dari Pak Gubernur kepada Kementerian LHK," ujarnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga sudah meminta Kepala Dinas Kehutanan melakukan verifikasi di lapangan terhadap lahan Perhutani tersebut. Hasil verifikasi itu nantinya menjadi semacam rekomendasi teknis untuk Gubernur Jabar mengambil keputusan dan meneruskan rekomendasi kepada LHK. "Mudah-mudahan bisa dimulai [akhir] Maret untuk selanjutnya pembebasan dan konstruksinya," katanya.

Iwa menilai bahwa urusan administrasi pertanahan memang harus disegerakan pihak BUJT mengingat target operasi tol dari Jatiasih, Bekasi hingga Sadang, Purwakarta ini direncanakan pada 2020.

Dengan biaya investasi mencapai Rp14,6 triliun, biaya konstruksi Rp8,8 triliun, dan biaya tanah sekitar Rp10 triliun pengerjaan akan dikebut tahun ini.

"Direncanakan mulai bekerja sebetulnya tahun ini, tadi ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan terkait dengan masalah tanah," paparnya.

Meskipun masih ada ganjalan proses lahan Perhutani, Pemprov Jabar optimistis bahwa tol ini bisa tuntas sesuai dengan target.

Oleh karena, pihaknya mendorong agar BUJT bisa menyelesaikan seluruh persyaratan

normatif bisa selesai singkat. "Hal itu agar akhir April sudah pembebasan sebagian [lahan] dan Mei sudah mulai [konstruksi]," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT JJS Dedi Krisnariawan Sunoto mengatakan bahwa untuk lahan Perhutani, pihaknya sudah berkoordinasi terkait dengan upaya pinjam pakai untuk melakukan pematokan lahan.

Berdasarkan hasil rapat, Pemprov Jabar akan turut bersama-sama menginventarisir lahan tersebut dalam rangka mendapatkan rekomendasi gubernur. "Kalau itu sudah keluar tinggal ke kementerian," katanya.

Pihak PT JJS menargetkan, dua paket tahap pekerjaan tol bisa digenjut hingga tuntas pada 2020. Menurutnya, paket III yang dimulai dari Sadang—Taman Mekar sepanjang hampir 28 kilometer akan dilanjutkan dengan paket II Taman Mekar—Setu sepanjang 24,85 kilometer. "Tidak berbarengan, karena [paket II] menunggu lahannya bebas dulu," katanya.

Paket I Setu—Jati Asih dikerjakan terakhir karena ruas melewati cukup banyak perumahan yang ditaksir pihaknya akan membuat proyek mengalami perlambatan. Fokus pada paket II dan III pekerjaan ini dilakukan JJS agar Japek bertemu dengan proyek Tol Jakarta Outer Ring Road II Cimanggis—Cibitung yang juga tengah dikerjakan.

"Kami fokus 52 kilometer dulu. Jadi dari tol Tangerang mau ke Japek bisa lewat JORR II, dari Jagorawi masuk ke JORR II lalu ke Japek Selatan. Begitupun juga yang dari Japek I bisa lewat juga, jadi ini berfungsi menjadi jaringan," ujarnya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan PT Pembangunan Perumahan (PTPP) dan PT Wira Nusantara Bumi (WNB) yang menginisiasi tol Cikarang—Ciranjang, Cianjur.

Dedi memastikan bahwa pihaknya ikut terlibat dalam desain tol tersebut. "Ini sudah terkoordinasi, dan memang nyambung dengan Japek Selatan," katanya. (K57) 

► Dalam rapat terakhir, meskipun penlok sudah lahir tetapi masih ada beberapa hal yang perlu penyelesaian secara normatif terkait dengan proses perizinan penggunaan lahan Perhutani.